**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A.Partisipasi Indonesia melalui misi PBB dalam menyelesaikan resolusi konflik di Darfur Sudan**

* 1. **Latar Belakang**

Mengingat Timor Leste adalah negara baru yang memisahkan diri dari negara Republik Indonesia melalui jajak pendapat pada tahun 1999 maka dengan itu telah mempunyai negara berdaulat dan memiliki hak untuk bergabung dengan organisasi nternasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya penyelesaian konflik di dunia .Juga karena penulis ingin sekali tahu bagaimana proses dan prosedur yang harus di tempuh untuk bisa mengurus semua administrasi sebelum mau bergabung atau mengajukan proposal perihal timor leste menjadi negara penyumbang tentara Timor Leste Forca Falentil Defesa De Timor Leste (Falentil) dan polisi Timor Leste Policia Nasional de Timor Leste melalui Duta Besar untuk Amerika Serikat untuk mengfasilitasi kerja sama ini .

Penulis pun sebelum melanjukan pendidkan Strata 1 di Indonesia pernah bekerja di Perserikatan Bngsa-Bangsa di Timor Leste United Nations Mission of Timor Leste (UNMIT) di bagian Contingetn Owned Equipment dari tahun 2007 sampai dengan 2012 belajar sedikit tentang tugas dan tanggung jawab dari pada FPU itu sendiri akan tetapi ingin mengetahui lebih lengkap dan mendalam mempunyai pemikiran bahwa kedepan pengetahuan penulis bisa bermanfaat dan memberi masukan dan kemudahan proses dan prosedur yang telah di pelajari bisa bermanfaat dan di terima sebagai masukan ilmu tambahan untuk negara Timor Leste itu sendiri.

Konflik dan perang telah terjadi di mana-mana di seluruh dunia ini. Bumi yang terkotak-kotak menjadi 194 negara dengan lebih dari 6 miliar manusia hidup di dalamnya penuh dengan konflik, seperti konflik antarmanusia, antargolongan, antaretnis, hingga antarnegara. Steven D. Strauss dalam bukunya World Conflicts menyatakan bahwa dalam setengah abad terakhir, tidak ada dari 194 negara di dunia ini yang tidak pernah terlibat konflik. Setiap negara pernah mengalami konflik baik dalam negeri maupun luar negeri, satu kali atau bahkan lebih.

Perang atau konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan di muka bumi dalam sejarah umat manusia. Satu hal yang pasti bahwa perang merupakan sesuatu yang harus diterima sebagai fakta yang mewarnai sejarah kehidupan manusia dan perang merupakan hal yang sulit untuk dihindari maupun dihapuskan, dapat dikatakan bahwa perang itu akan selalu ada. Bahkan dalam perkembangannya sekarang istilah perang ini mengalami perubahan paradigma. Menurut perkembangannya saat ini perang tidak hanya melibatkan pihak antar negara saja melainkan pihak bukan negara dapat juga terlibat dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata.

Seperti halnya konflik bersenjata antara negara dengan pasukan pemberontak dalam suatu negara yang merupakan konflik antara negara dengan pihak bukan negara.

Hukum internasional telah mengatur tentang konflik bersenjata, yaitu dalam hukum humaniter internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum humaniter internasional adalah hukum humaniter internasional yang merupakan bagian dari hukum internasional umum, yang inti dan maksudnya diarahkan kepada perlindungan individu, khususnya dalam situasi-situasi perang. Hukum humaniter terbagi atas dua bagian ius ad bellum, yaitu hukum tentang perang dan ius in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum humaniter internasional memiliki sumber utama yaitu, Konvensi den Haag 1907 yang mengatur tentang alat dan cara berperang, Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai perbaikan anggota angkatan perang yang sakit dan luka di medan pertempuran darat (Konvensi Jenewa I 1949), mengenai perbaikan anggota angkatan perang di laut yang luka dan sakit dan korban karam (Konvensi Jenewa II 1949), mengenai perlakuan tawanan perang (Konvensi Jenewa III 1949), mengenai perlakuan orang-orang sipil diwaktu perang (Konvensi Jenewa IV 1949) dan Protokol Tambahan I 1977 mengenai konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II 1977 mengenai konflik bersenjata non-internasional.3 Tujuan utama hukum humaniter internasional adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata aktif turut dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil).

Menurut hukum humaniter internasioanl konflik barsenjata antara negara dengan pihak bukan negara disebut dengan konflik bersenjata non-internasional. Disebutkan bahwa konflik bersenjata yang dimaksud dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949 adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam suatu wilayah negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan pemberontak atau dengan pasukan bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan.

Juga konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang ,kelompok atau organisasi-organisasi[[1]](#footnote-1)

Mengingat adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan dalam bidang management ,maka adalah rasional untuk menduga akan timbulnya perbedaan-perbedaan pendapat,keyakinan-keyakinan sera ide-ide

Di samping itu perlu pula diingat bahwa apabila orang-orang bekerja sama erat dan khususnya dalam rangka upaya mengejar sasaran-sasaran umum, maka cukup beralasan untuk mwngumsunsi bahwa dengan berlangsungnnya waktu yang cukup lama , seperti akan timbul perbedaan-perbedaan pendapat anrata mereka.

Mengingat bahwa konflik tidak dapat dihindari,maka approach yang baik untuk diterapkan para manager adalah pendekatan mencoba memanfaatkan konflik demikian rupa hingga Ia tetap serta efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan.

Pendekatan konflik sebagai bagian normal dari perilaku dapat di manfaatkan sebagai alat untuk mempromosi dan mencapai perubahan-perubahan yang dikehendaki.[[2]](#footnote-2) Konflik Darfur adalah konflik yang terjadi sebagai lanjutan atau akibat dari konflik yang telah terjadi sebelumnya, yaitu konflik antara utara dan selatan. Sejak tahun 1924, Inggris menjalankan kebijakan pemisahan pemerintahan Sudan menjadi Sudan Selatan yang mayoritas beragama Kristen dan Animisme; dan Sudan Utara yang mayoritas muslim. Penduduk wilayah utara yang tinggal diwilayah lebih dari garis lintang 10o LU tidak boleh berpindah ke wilayah selatan dan sebaliknya penduduk selatan dibawah garis lintang 8o LU dilarang berpindang ke wilayah utara.1 Kebijakan itu diklaim untuk mencegah penyebaran Malaria, namun sejatinya juga untuk mendukung misionaris guna menyebarkan Kristen di Sudan Selatan dan menghalangi penyebaran Islam dan tradisi muslim. Inggris pun membangun kesadaran identitas penduduk Sudan wilayah selatan, bahwa mereka adalah penduduk asli Afrika (yang berbeda dengan Utara). Hasilnya adalah semakin intensifnya pemisahan Sudan Selatan dari Sudan Utara. Ini menjadi bibit konflik di kemudian hari. Tidak hanya itu, Inggris pun membangun pola pemerintahan tradisional di bawah pimpinan para syaikh di Utara dan pemimpin suku di Selatan yang memberikan andil terhadap lemahnya sistem pemerintahan Sudan dikemudian hari.

Setahun menjelang kemerdekaan, pada tahun 1955, perang sipil mulai terjadi antara Sudan Selatan dan Sudan Utara. Sudan Selatan yang tentu saja lebih loyal kepada Inggris takut kalau pasca kemerdekaan akan didominasi oleh Sudan Utara yang dinilai dekat dengan Mesir yang loyal kepada AS. Kemerdekaan Sudan 1956 itu akhirnya disertai terjadinya perang sipil pertama (Civil War I ) antara Sudan Selatan dan Sudan Utara. Civil War I ini berlangsung dari 1955 – 1972. Pada tahun 1972 disepakati perjanjian penghentian perang dalam perjanjian Addis Ababa (Addis Ababa Agreement - AAA) yang disponsori oleh Dewan Gereja Dunia (World Council of Churches).[[3]](#footnote-3)

Pada saat Sudan merdeka, terjadi perebutan pengaruh antara Inggris dengan Amerika yang menggunakan tangan Abdul Nasher. Meski yang menjadi PM Sudan adalah Ismail Ajhari yang dekat dengan Abdul Nasher dan termasuk loyalis Amerika, namun kekuasaan sebenarnya di Sudan masih berada di tangan orang-orang yang loyal kepada Inggris. Sehingga Sudan meski sudah merdeka, tetap berada di bawah pengaruh Inggris. Dalam hal ini masalah Sudan Selatan – Sudan Utara dijadikan oleh Inggris sebagai alat politik untuk menjamin agar Sudan tetap berada di bawah pengaruhnya.

Selama ini pemberontak di Sudan Selatan sangat loyal kepada Inggris. AS bisa dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap kelompok pemberontak Sudan Selatan. Namun seiring dengan perkembangannya, AS berubah haluan menjadi pendukung Sudan Selatan. Dukungan AS kepada Sudan Selatan tersebut diwujudkan dengan melatih dan mempersenjatai pemberontak Sudan Selatan, SPLA. Lebih dari 20 miliar dolar peralatan militer telah dikirimkan AS kepada pemberontak SPLA.

Pada bulan Juli 2002, Pemerintah dan SPLA mencapai kesepakatan tentang kekuasaan negara dan agama, dan hak menentukan nasib sendiri bagi Sudan Selatan. Kesepakatan itu dinamakan Protokol Machakos.3 Ditetapkannya hak menentukan nasib sendiri, pembagian kekayaan dan kekuasaan di dalam Protokol Machakos ini merupakan satu hal yang sangat berbahaya. Karena dengan diakuinya itu, akan terbuka pintu bagi propinsi dan daerah-daerah lainnya untuk menuntut hal yang sama. Dan dalam hal ini pihak yang memrovokasi Sudan Selatan atau terutama John Garang yaitu AS juga memprovokasi propinsi dan daerah lainnya untuk menuntut hal yang sama. Hal itu diisyaratkan pada berkembangnya masalah yang disebut masalah daerah-daerah marjinal yaitu Nuba Mountain, Selatan Nil Biru, Sudan Timur dan Darfur. Dan terbukti kemudian meletus konflik Darfur yang diantara tuntutannya adalah tuntutan untuk mendapat perlakuan yang sama dengan Sudan Selatan.

Darfur, tak akan dikenal oleh dunia apabila tidak ada krisis yang muncul di sana. Krisis Darfur mulai muncul di peta dunia ketika beberapa LSM international seperti International Crisis Group, Human Watch International, dan Amnesty International menyebutkan munculnya pembantaian massal (genocide), pembunuhan, pemerkosaan, dan pengusiran secara besar-besaran etnis Fur dan Massaleit di Darfur oleh milisi yang dikenal dengan nama, Janjaweed.

Darfur adalah sebuah daerah di Sudan bagian barat jauh, yang berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Chad. Berbeda dengan beberapa civil war yang pernah terjadi di Sudan, konflik bersenjata yang terjadi di Darfur bukan disebabkan oleh permasalahan agama, tetapi konflik etnis yang disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, yang memberikan stimulus terhadap potensi-potensi konflik yang ada di Darfur.5 Faktor utama penyebab pecahnya perang saudara di Darfur menyangkut dengan faktor¬faktor survival mengenai bagaimana hidup di Afrika yang sangat konfliktual. Konflik ini disebabkan oleh permasalahan dasar survival, yaitu kekeringan, overpopulation, dan desertifikasi.6 Oleh karena tiga faktor ini, para nomaden pastoralis Baggara (dalam bahasa Arab Baqqara) mulai mencari persediaan air ke arah selatan. Di daerah di mana para nomaden Baggara itu berusaha mendapatkan persediaan airnya, terjadilah “gesekan” dengan penduduk asli yang mayoritas adalah bangsa Afrika berkulit hitam. Karena adanya akar¬akar konflik dalam sentimentil etnis antara masyarakat Afrika berkulit hitam dengan nomaden Baggara yang merupakan bagian dari ras Arab, akhirnya konflik pun meletus pada Februari 2003. Pada tahun 2003 dua kelompok bersenjata melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Sudan yang pada saat itu didominasi oleh etnis ras Arab. Dua kelompok pemberontak itu adalah Justice and Equality Movement (JEM) dan Sudanese Liberation.

Kronium,marmer granat,tembaga,uranium,seng,nikel dan juga timah serta hasil-hasil pertanian seperti kapas,padi dan rempah-rempah tidak mendapatkan manfaat dari sumber daya yang mereka milikisehingga menyebabkan perekonomian wilayah Selatan dan barat sangat memperihatinkan.

Juga karena selama kebersamaan mereka semua pemimpin negara di kuasai oleh Indo Arab sehingga mengundang pribumi ricuh dan seolah-olah tidak mempunyai harkat dan martabat di negaranya sendiri.Setelah konflik ini terjadi ada beberapa pilihan ditawarkan di antaranya pembagian kekuasaan di Khartoun yang membuka kesempatan para pemuka Sudan Selatan menduduki jabatan tinggi, bukan saja sebagai wakil Presiden pertama Sudan tapi juga menteri di kabinet,di tentukannya masa transisi enam tahun bagi Sudan Selatan sebagai persiapan referendum,yang akan menetukan apakah Sudan Selatan akan tetap bersatu atau ingin berpisah dari Sudan dan ditentukan pembagian kekeyaan alam ,khususnya minyak mentah,masing masing 50 persen.

Akan tetapi tetap pada pendiriannya bahwa lebih memilih memisahkan diri.Dalam referendun Sudan waktu itu rakyat Sudan Selatan diberikan dua pilihan antara persatuan,ataupun perpisahan,Perpisahan berarti Sudan Selatan akan tetap menjadi bagian dari Sudan,diberikkan otonomi daerah,serta akan terjadi intergrasi pasukan militer kedua pihak yang lebih intensip.Perpisahan berarti Sudan Selatan akan membentuk sebuah pemerintah yang baru,memiliki otoritas penuh terhadap wilayah mereka, dan kemudian tidak besar tidak akan adacampur tangan apapun oleh pemerintahan di Khartoun.

Dari hasil penolakan itu maka diadakanya referendum pada tanggal 09 Januari 2011 menunjukan bahwa 99% dari warga di Sudan Selatan memilih untuk berpisah(kemerdekaan sudan Selatan).Dari 3.851.994 penduduk yang memilih,hanya 44.888 yang memilihuntuk tetap menyatukan kedua daerah tersebut.

Kepentingan-kepentingan di atas itu yang memicu sehingga tidak meratanya pembangunan yang di rasakan oleh kebelah pihak maka terjadinya konflik intranegara yang berkepanjangan dan menyita waktu dengan korban jiwa dan gara yang tidak sedikit dan harta kekayaan yang yang tak ternilai harga turut menjadi korban karena keselisihpaham tersebut.

Konflik di Darfur pecah dengan latar belakang yang sama dengan perang sipil Sudan, antar Sudan Selatan dan Sudan Utara.Pemerintahan pusat Khartoum dituduh.

Pemerintah Sudan dengan *LSM/A* dan *JEM* menandatangani perjanjian setebal 85 halaman pada 5 Mei 2006.Sebelumnya, Kedua kelompok itu menuntut lebih banyak kosensi dari pihak pemerintah Sudan, antara lain jabatan wakil PresidenSudan.Perjanjian baru itu dinilai pemerintah Sudan dan kedua pemberontak sebagai “tidak lengkap”. Kesempatan damai itu tidak otomotis menghentikan ketengangan di Darfur.Bahkan para pengungsi di Kamp Kalma, di selatan kota Nyala berdemonstrasi menuntut agar pasukan penjaga perdamaian di tempatkan lebih banyak di sana, khawatir akan keselamatan mereka.

KORBAN DAN KERUGIAN

Memang rakyat Darfur telah lama menderita. Konflik selama tiga tahun menyebabkan tewasnya lebih dari 300.000 orang,kebanyakan karena kelaparan dan kehausan serta penyakit.serta kematian dalam medan perang) Wars Crimes),bahkan sampai genosida( genoside) yang secara tidak langsung berkaitan dengan komando yang di berikan oleh kepala negaraSudan,Omar Al-Bashir Selain itu lebih dari 2,4 juta orang hidup dalam pengungsian, sebagai *internail displaced persons”(IDP’s*)baik di Darfur maupun yang melintas masuk ke negara tetangga Chad, memiliki perbatasan sepanjang 1360 km di barat Darfur.

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di beberkan sebelumnya, maka indentifikasi masalah yang akan di kemukakan Indonesia sebagai contingent misi perdamaian PBB oleh penulis adalah:

1. Bagaimana upaya PBB dalam menyelesaikan konflik internal di pasukan perdamaian PBB di Darfur Sudan
2. Bagaimana kendala yang di hadapi Indonesia sebagai pasukan perdamaian dalam konflik di Darfur Sudan?
3. Bagaimana pelaksanaan operasi misi pemeliharaan dalam konflik di Darfur Sudan,?

**1.3 Pembatasan Masalah**

Mengingat kasus yang di angkat adalah lebih fokus kepada pengiriman pasukan Indonesia ke darfur lebih luas maka di sini penulis lebih memilih permasalahan di titikberatkan pada :

Upaya Indonesia sebagai kontingen Misi Perdamaian PBB dalam konflik Darfur Sudan.

**1.4 Perumusan Masalah**

Mengenai perumusan masalah yang di angkat oleh penulis adalah melalui Polisi berseragam (FPU) dalam menyelesaikan resolusi konflik di Darfur Sudan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai mandate yang di amanatkan oleh PBB yang tersirat di dalam memorandum of understanding (MOU):

sejauh mana Indonesia melalui pasukan PBB dalam menyelesaikan resolusi konflik di Darfur Sudan

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.5.1 Tujuan Penelitian**

a. Ingin mengetahui upaya PBB dalam menyelesaikan resolusi konflik di Darfur Sudan

b. Kendala apa dan bagaimana proses pelaksanaan operasi dalam penyelesaian resolusi konflik di Darfur Sudan

c. Bagaimana keterlibatan Polisi berseragam (FPU) di lapangan saat

Melaksanakan misi perdamaian konflik di Darfir Sudan

**1.5.2 Kegunaan Penelitian**

* 1. Kegunaan teoritis
1. Penelitian ini di harapkan dapat menerima semua informasi terkait misi PBB di Darfur untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja sama itu dan proses rembusment atau keuangan sebagai ganti rugi jasa yang telah di berika oleh *FPU* indonesia di Darfur sesuai yang tersirat di dalam *Memorandun of Undertanding*.
2. Untuk lebih mengetahui situasi gawat atau darurat dan bagaimana dengan komunikasi dengan masyarakat lokal yang susah di hubungi karena alasan bahasa langka apa yang di pakai *FPU* untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat local.
3. Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan di masa mendatang sebagai pegangan di bidang akademis sebagai *reference* dan menjadi bahan perpustakaan

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Mahasiswa

a) Menjadi media untuk melakukan studi secara lebih komprehensif mengenai disiplin ilmu Hubungan International khususnya dalam bidang organisasi Internasional khususnya dalam bidang,kebijakan luar negeri, isi mengenai perdamaian polemologi dan resolusi konflik.

b) Menjadi media dan sumber untuk mengimplikasikan ilmu yang di peroleh di bangku kuliah kedalam suatu bentuk karya tulis ilmiah

1. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini di harapkan untuk memberikan sumbangan informasi data, fakta dan kebenaran dan keberhasilan maksimal di setiap penugasan kepada masyarakat secara lebih luas mengenai kiprah kepolisian Negara Republik Indonesia di dunia *International* dalam menjalankan misi perdamaian yang di amanatkan oleh PBB

* 1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

**1.6.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan sumber ilmu dan landasan atau bahan pegangan untuk dan mengindentifikasi menganalisa kasus yang akan di teliti.Warisan keilmuan berupa konsep teori dan pernyataan para pakar atau otoritas tertentu yang memiliki wewenang atau kemampuan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan maupun fenomena yang terjadi sangat di perlukan sebagai bahan acuan dalam permasalahan yang sedang di hadapi.

Dinamika kontek hubungan Internatinal belakangan ini menunjukan kecendrungan dan kelajiman bahwa lebih berhaluan pada kepentingan suatu negara yang sedang berjalan dan memerlukan uluran tangan dari negara lain untuk sama sama memberi sumbagan penyelesaian.Hubungan International merupakan fakta dimana fakta tersebut berkembang terus menerus dan melahirkan hal hal baru yang mengundang perhatian negara lain untuk melibatkan diri untuk pencapaian penyelesaian.Pergaulan masyarakat international memiliki pandangan yang berbeda , seperti dalam masalah perbedaan sistem negara, sistem ekonomi, idiologi etnik,agama, kebudayaan,industri dan kemampuan ilmu pengetahuan danteknologi yang bertaraf international dan terus bersaing dengan negara maju lainnya serta adanya perbedaan kepentingan maupun perpektif lainnya yang tak terduga akan terjadi seiring globalisasi yang semakin tersaingi oleh negara dengan negara yang lain.

Pengertian Hubungan International menurut Schwarjenberger

Hubungan International dalam bagian bari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat international, Sementara Hoffman menyatakan bahwa ilmu hubungan international sebagai subyek akademis terutama pempertahan hubungan politik antara sedangkan McClellad mendefinisikan hubungan international secara jelas sebagai studi tentang interaksi antar jenis- jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu,termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengililingi interaksi.

Mengenai pengertian politik internasional ,Yuan C.Chen seorang pakar politik international mengatakan bahwa

 politik internasional juga dapat di sebut politik antar negara yang mencakup interest and Action( kepentingan dan tindakan) dan negara negara didunia dalam hubungannya satu sama lain atau dapat juga disebut sebagai proses interaksi antar negara-negara dan antar organisasi-organisasi international.

Selain itu itu menurut Hans J.Morgenthau dalam bukunya “*politic Among Nation*” mendefinisikan sebagai berikut”

International Politic like of other politics,poweris always the immediate man control over demands and action of other man.Politik international seperti semua politik lainnya. Kekuasaan adalah tujuan utamanya manusia mengotrol tidakan manusia lainnya.

Untuk lebin lanjut bagi penulis untuk membahas mengenai politik International yang bisa di jadikan sebagai pegangan permasalahan yang di kaji.Mengenai politik International, Joseph Fracle dalam bukunya *“International Politics, Conflic and Harmony* mendefinisikan sebagai berikut,politik bertolak dari fakta sosial yang memperlihatkan bahwa manusia mmemiliki beberapa keinginan yang tidak mungkin di lakukan melalui usaha individual, maka manusia mengorganisasikan dirinya kedalam berbagai kelompok untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut.Pengelompokan itu kemudian menimbulkan berbagai pola tingkah laku massa yang langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan kenegaraan,kewenangan, kekuasaan (power) dan kaidah-kaidah hukum lainnya.Kelompok-kelompok itu baik dalam bentuk negara atau bangsa,organisasi-organisasi international,mengikat dan melakukan berbagai tindakan dan bereaksi yang membentuk apa yang di sebut politik international.

Organisasi Internasional beserta dinamika Hubungan International yang terjadi di dalamnya ,mengalami eksistensi yang cukup kuat dewasa ini. Sangat penting untuk kita mengetahui apa yang di maksud dengan Organisasi International Sumaryo Suryokusumo mengemukakan mengenai definisi dari Organisasi International, sebagai berikut.

Organisasi International adalah organisasi yang di buat oleh anggota masyarakat international secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan mencipkan perdamaian dunia dalam tata hubungan international.Pada hakekatnya organisasi intrnational memiliki arti luas dan sempit.Secara luas, organisasi international meliputi organisasi regional, organisasi subregional, dan organisasi bersifat univrsal( *organijation of Universal Character*).Secara sempit hanya meliputi organisasi international public.PBB juga merupakan organisasi international yang memiliki tujuan utama dalam perjanjian *Atlantic Charter*.Contoh lain adalah *MEE,OPEC*,dan *ASEAN.*

Pembentukan suatu kerja sama untuk mencegah terjadinya instabilitas , telah dibentuk LBB yang dewasa ini menjadi PBB yang menunjukan bagaimana Organisasi Internasional perkembangan dari waktu ke waktu yang di kemukakan oleh Ade Maman Suherman,bahwakedua lembaga tersebut (LBBdan PBB), dibentuk dan dilatar belakangi karena perselisihan , dan peperangan anrat umat manusia .Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB)adalah merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengantujuan utama adalah memelihara perdamaian di bawah suatu sistem kolektif.

Sehubungan dengan hal ini operasi pemeliharaan yang di lakukan di PBB di berbagai daerah konflik,seperti yang di lakukan di Darfur Sudan yang merupakan penelitian dari penulis, menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita dasar tujuan dari pembentukan PBB.

Apa yang di lakukan PBB dalam menjalankan misinya dengan penggelaran pasukan perdamaian , merupakan upaya untuk menjalankan resolusi yang telah di buat dengan tujuan untuk meredam meredam bahwak menghentikan konflik yang terjadi di Darfur Sudan.Sehubungan dengan hal ini Max van Soul (1994)*OSCE High Commission on National Minorities* bependapat bahwa Konflik termasuk konflik etnis, bukannya tidak dapat dihindari tetapi sebenarnya dapat dicegah.Akan tetapi dalam hal ini di prlukan berbagai usaha.Sumber –sumber potensial konflik perlu diindentifikasi dan di analisa dengan sebuah pandangan terhadap penyelesaian awal, dan langka-langkah kongkret harus di ambil untuk mencegah konfrontasi bersenjata.Jika tindakan preventif ini digantikan oleh penanaman konflik maka sebuah peringatan awal harus di berikan pada saat di lakukan usaha untuk melokalisir konflik yang lebih keras agar tidak terjadi.

Selain itu, Loekito Santoso berpendapat mengenai prakondisi perdamaian, sebagai berikut:

Selah satu indikator yang dominan dari prakondisi perdamaian adalah ketahanan dalam purnayudha ,yaitu kondisi ketahanan dan daya tahan (*autdaver*) serta membangun kembali keadaan meskipun baru saja selesai berperang.Mengingat bahwa pengertian damai bukan hanya keadaan tanpa perang, melainkan mengandung pengertian damai positif, maka kemenangan dalam perdamaian harus di isi dengan pembangunan.demikian maka indikator ketahanan dalam purnayudha mengandung tujuan kembar ,yaitu perdamaian dan pembangunan dimana jalan damai dapat dijalani oleh roda-roda pembangunan tanpa usaha positif, keadaan damai yang sudah diperoleh dengan biaya yang tidak sedikit akan merosot kembali menjadi damai negatif,yaitu damai yang hanya tidak adanya perang sehingga masih mungkin kembali terjerumus ke dalam perang serta kekacauan tanpa ketertiban.Damai positif mengandung ketertiban sebagaimana dinyatakan oleh St.Augustine, yaitu bahwa damai adalah ketertiban dalam ketentraman sehingga memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam sebuah operasi misi pemeliharaan perdamaian,Dewan Keamanan PBB merupakan badan dalam organisasi PBB yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan utama. Badan-badan lain dalam PBB hanya dapat memberikan rekomendasi kepada negara-negara sementara.Dalam penyelenggaraan misi pemeliharaan pardamaian PBB dikenal adanya 5 jenis operasi dukungan perdamaian PBB, yaitu sebagai berikut :

*Preventive Diplomacy*

Upaya diplomasi yang di lakukan untuk mencegah terjadinya krisis atau menurunkan derajat krisis sampai pada tingkat paling rendah.Konsep preventive diplomacy antara lain diulas dalam dokumen An Agenda for Peace yang Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros Ghali pada tahun 1992. Documen tersebut mendefinisikan preventive diplomacy sebagai upaya mencegah timbulnya perselisihan mencegah meningkatkan perselisihan menjadi konflik dan membatasi dampak negative dari konflik yang terjadi.’dan menyebutkan bahwa upaya diplomasi harus di lakukan untuk mencegah ketengangan (tension) berkembang menjadi konflik.Jika konflik terjadi ,upaya diplomasi harus dilakukan untuk mengatasinya dengan memperlihatkan faktor penyebab terjadinya konflik tersebut.*Preventive Diplomacy* antara lain dilakukan oleh PBB melalui penerapan sistem yang dapat memberikan peringatan dini sebagai potensi timbulnya konflik.Jika konflik terjadi maka PBB memyanpaikan proposal pemyelesaian secara damai kepada pihak-pihak yang terlibat.[[4]](#footnote-4)

*Peacemaking* :

Upaya menciptakan perdamaian di daerah konflik atau menyelesaikan perselisihan yang dapat memicu terjadinya konflik memalui upaya mediasi ,negosiasi, konsoliasi, arbitrasi dan cara-cara damai lainnya .Tindakan ini di lakukan diwilayah bekas konflik pada salah satu atau seluruh pihak yang bertikai melakukan pelanggaranatas kesempatan damai.Klausal tentang peacemaking antara lain diatur dalam pasal 6 piagam PBB.[[5]](#footnote-5)

*Peacekeeping:*

Melaksanakan dan memonitor pelaksanaan perjanjian yang terkait dengan pengendalian konflik dan resolusinya untuk menjamin keamanan pengiriman bantuan kemanusian.

*Peace enforcement*:

Penggunaan kekuatan militer untuk menekan pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam konflik agar menghindari dan menghentikan tindakan yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian.Peace enforcement atau penegakan perdamaian umumnya diterapkan berdasarkan mandat PBB atau organisasi regional.Target *operasi peaceendorment* pada umumnya adalah menjaga kepatuhan pihak-pihak terhadap resolusiatau sanksiyang di terakan untuk menyelesaikan konflik.Contoh peace enviroment adalah penerjunan pasukan international dengan mandat PBB di Semenanjung Korea Utara 1950 dan di Irak 1990.[[6]](#footnote-6)

*Peace building*:

Upaya pemulihan stabilitas serta pemberdayaan institusi dan struktur sosial, politik ,dan ekonomi setelah terjadinya perang atau peristiwa lain yang menimbulkan dampak seperti perang.Proses peace building atau pencitaan perdamaian pada umumnya bertujuan untuk menciptakan dan menjamin keamanan serta menjaga agar konflik tidak terjadi kembali.(re emerge). Konsep ini kemudian berkembang dan mencakup aspek-aspek lain seperti panyaluran bantuan kemanuasian, perlindungan hak asasi manusia,pemeliharaan ketertiban, dan percepatan rekonsiliasi, pemulihan dampak sosial,repatriasi pengunsi, dan rekonstru perekonomian.Perluasan cukupan ini di antara lain dipromosikan oleh sekertaris Jenderal PBB Boutros Boutros Ghali dalam document yang berjudul *An Ageand for Peace* yang terbit pada tahun 1992 dan 1995.Boutros Ghali menegaskan bahwa rekonstruksi pasca konflik juga harus mencakup upaya pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri yang merupakan elemen penting dalam terpeliharaannya perdamaian. Boutros Ghali juga menekankan aspek tesalingterkaitan antara pembangunan dan perdamaian sebagai bagian tak terpisahkan dari peace building.Untuk menjalankanan konsep ini PBB membentuk *peacebuilding Support office* yang beroperasi di Liberia,Guinea-Bissau, dan Republik Afrika Tengah pada akhir 1990-an.[[7]](#footnote-7)

Indonesia tidak bisa tidak mendukung mandat dari DK PBB tersebut untuk ikut melaksanakan misi pemeliharaan , salah satunya dengan mengirimkan pasukan FPU atau Unit Polisi Berseragam.Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang dari penelitian.

Antisipasi Indonesia dalam pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB,Dalam hal ini FPU Indonesia didasari oleh atas semangat Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke IV, tentang komitment indonesia untuk ikut melaksanaka ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Komitment tersebut juga tercermin di dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.Khususnya dalam hal upaya Indonesia untuk turut berperan aktif menjaga keamanan, keteriban dan perdamaian dunia.

Proses pembuatan politik luar negeri suatu negara, menurut Rosenau dipengaruhi oleh faktor faktor internal dan external yang menjadi input dalam proses tersebut.Faktor internal ini mengacu pada keberadaan negara dan yang dimaksud lingkup internal disini seperti pemerintah ,perekonomian negara maupun kapabilitas negara.Lingkungan external yang mempengaruhi kebijakan luar negara suatu negara merupakan semua alternatif bagi pembuat keputusan .Hal ini mengyangkut seperti globalisasi .peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu negara namun berdampak pada sistem international, aliansi kekuatan militer.[[8]](#footnote-8)

Politik luar negeri yang dapat dikategorikan menjadi pemgaruh (*aspek power*) pada dasarnya merupakan perangkat untuk mencapai tujuan,kapabilitas yang merupakan kekuatan mental /fisik kualitas dimiliki dan dapat digunakan sebagai perangkat pendesak untuk membujuk, memberi imbalan, mengancam atau memberikan sanksi,respon terhadap negara-negara lain ( *respon* terhadap situasi/stimulus merupakan reaksi.

Pengertian politik luar negeri mengacu pada langkah-langkah konkret yang diambil para pejabat yang berhubungan dengan kajian serta situasi di luar negeri yang merupakan kelanjutan dan penterjemahan orientasi umur dan pengembangan serta artikulasi dari sasaran dan komitmen yang bersifat specifik.Dipandang dari sudut peringkat ketiga ini,politik luar negeri adalah perilaku eksternal dari suatu negara [[9]](#footnote-9).Komitmen Indonesia untuk dapat ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan,ketertiban dan perdamaian dunia merupakan wujud konkrit dari pemantapan politik luar negeri indonesia untuk meningkatkan peranan Indonesia dalam konstelasi Hubungan International.[[10]](#footnote-10)

Dalam setiap konflik,termasuk konflik yang terjadi di Darfur, Sudan ,Selalu di cari jalan penyelesaian.Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung .Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara ataupun sebagai Organisasi regional bahkan Organisasi Internasional.Selebihnya,menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu : [[11]](#footnote-11)

***Peacekeeping*:**

**Melaksanakan dan memonitor pelaksanaan perjanjian yang terkait dengan pengendalian konflik dan resolusinya untuk menjamin keamanan pengiriman bantuan kemanusian.**

***Peacemaking* :**

**Upaya menciptakan perdamaian di daerah konflik atau menyelesaikan perselisihan yang dapat memicu terjadinya konflik memalui upaya mediasi,negosiasi, konsoliasi, arbitrasi dan cara-cara damai lainnya.Tindakan ini di lakukan diwilayah bekas konflik pada salah satu atau seluruh pihak yang bertikai melakukan pelanggaranatas kesempatan damai.Klausal tentang peacemaking antara lain diatur dalam pasal 6 piagam PBB.**

***Peace building*:**

**upaya pemulihan stabilitas serta pemberdayaan institusi dan struktur sosial, politik,dan ekonomi setelah terjadinya perang atau peristiwa lain yang menimbulkan dampak seperti perang.Proses peace building atau pencitaan perdamaian pada umumnya bertujuan untuk menciptakan dan menjamin keamanan serta menjaga agar konflik tidak terjadi kembali.(*reemerge*). Konsep ini kemudian berkembang dan mencakup aspek-aspek lain seperti panyaluran bantuan kemanuasian, perlindungan hak asasi manusia,pemeliaharaan ketertiban, dan percepatan rekonsiliasi, pemulihan dampak sosial,repatriasi pengunsi, dan rekonstru perekonomian .Perluasan cukupan ini di antara lain dipromosikan oleh sekertaris Jenderal PBB Boutros Boutros Ghali dalam document yang berjudul An Age nda for Peace yang terbit pada tahun 1992 dan 1995.Boutros Ghali menegaskan bahwa rekonstruksi pasca konflik juga harus mencakup upaya pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri yang merupakan elemen penting dalam terpeliharaannya perdamaian. Boutros Ghali juga menekankan aspek tesalingterkaitan antara pembangunan dan perdamaian sebagai bagian tak terpisahkan dari peace building.Untuk menjalankanan konsep ini PBB membentuk peacebuilding Support office yang beroperasi di Liberia ,Guinea-Bissau, dan Republik Afrika Tengah pada akhir 1990-an**

Sebelum dua kelompok yang tergantung dalam Sudanese Liberation Movement/ARMY(SLM/A dan j*ustice and Equality Movement*(JEM) melancarkan serangan terhadap pasukan Sudan dan perdamaian wilayah Darfur pada bulan februari 2003.Yang membuka konflik vertikal, sesungguhnya pernah ada 29 kali konflik horisontal.Antara suku ,dalam kurun waktu 30 tahun (1968-1998), dalam skala dan intensistas kecil pada sejarahnya ,perkembangan negara Sudan adalah negara yang mana dipenuhi konflik yang tidak berkesudahan.Menurut Butterfield perang atau konflik bermula dari rasa ketakutan dan kegentaran ,yaitu ketakutan akan kegagalan dalam musyawarah sehingga akhirnya memilih jalan perang untuk dapat memutuskan cara pemecahan masalah.

Secara lebih jauh studi mengenai konflik internal menjadi semakin menarik untuk di kaji.Hal ini berkenaan dengan semakin mengemukannya konflik internal dalam beberapa dekade terakhir ini,terutama bersamaan dengan makin menarik maraknya konflik horisontal antar ras,etnis dan agama di dalam wilayah suatu negara.Sangat ironis bahwa ketika konflik idiologi mewarnai era perang dingin telah mulai mereda , konflik-konflik internal didalam batas wilayah suatu wilayah dalam bentuk gerakan separatis dan kerusuhan ternyata menelan korban manusia yang makin besar.[[12]](#footnote-12)

Michel E.Brown juga menyebutkan beberapa alasan mengapa studi mengenai konflik internal penting untuk dilakukan tidak hanya dalam studi ilmu politik tetapi juga dalam kurikulum Hubungan International,yaitu :

**Pertama,konflik internal telah merebak ke banyak negara dan menimbulakn aksi-aksi kekerasan**

**Kedua,konflik internal telah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban yang tidak berdaya akibat konflik, seperti pembunuhan, penyiksaan,pemerkosaan, dan pengusiran.**

**Ketiga konflik internal penting karena sering melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik perbatasan.Pengungsi yang menyeberang ke negara tetangga dapat menimbulkan permasalahan baru yang dapat memicu konflik bersenjata antar negara yang bertetangga.**

**Keempat,konflik internal penting karena sering mengudang parhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang tercantum kepentingannya dan organisasi International.**

Selanjutnya Edwar Ajar menyebutkan ada 4 prakondisi yang mengarah pada terjadinya atau pemicu konflik internal, yaitu : [[13]](#footnote-13)

**Pertama,hubungan yang tidak harmonis antara kelompok indentitas seperti suku agama dan budaya dengan pemerintah.Pemerintah cenderung tidak mengakui eksistensi kelompok indentitas tersebut dan bahkan berusaha mengeliminasinya demi kepentingan dan keutuhan negara.Akibatnya terjadi pertentangan terhadap kelompok identitas tertentu dan mendorong para anggotannya untuk melakukan perlawanan terhadap negara.sebagian Contoh,Pemerintah orde baru telah mengancam ekistensi kelompok identitas Aceh dan Papua mereka bangkit dan melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat.**

**Kedua,konflik juga di kaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses kemiskinan.Proses secara ekonomi telah menciptakan kemiskinan sementara kekuatan ekonomi dan politik dari pusat menikmati surplus ekonomi sebagai hasil exploitasi SDA di daerah-daerah yang dilanca konflik.Seperti contoh bagi rakyat Aceh dan Papua bahwa di tengah kekayaan alam mereka yang berlimpah terdapat jumlah penduduk miskin yang tergolong tinggi bila dibangdingkan dengan daerah-daerah lain yang tidak memiliki SDA.**

**Ketiga,sebab konflik internal berkaitan dengan karateristik pemerintah yang otoriter dan megabaikan aspirasi politik dari masyarakat.Dalam hal ini pemerintah pusat meyakini asumsi bahwa kekuasaan yang terpusat (sentral)menjamin kontrol yang efektif atas masyarakat.Bahkan kekuatan militer digunakan terhadap setiap bentuk protes atau perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter.Pemerintah daerah juga tidak dapat berfungsi sebagai alat perjuangan masyarakat daerah dikarenakan elit-elit daerah ikut menikmati eksplotasi SDA.**

**Keempat, konflik internal dikaitkan dengan dengan International Linkages,yaitu sistem ketergantungan yang terjadi antara negara dengan sistem ekonomi global dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk lokal misalnya ,dalam rangka melindungi kepentingan investor asing pemerintah rela menindas rakyatnya sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.**

Selain itu konflik Darfur merupakan konflik etnis, dimana konflik etnis adalah konflik yang terkait dengan permasalahan-permasalahan mendesak mengenai politik,ekonomi, sosial, budaya ,dn teritorial antara dua komunitas etnis atau lebih[[14]](#footnote-14).Dalam Hal ini etnis Arab telah menguasai pemerintah Sudan telah berlaku tidak adil dalam ekonomi, politik,sosial dan budaya.Dari sisi perekonomian ,pemerintah selalu mengutamakan pembangunan diwilayah utara saja, pengelolaan yang buruk oleh sejak masa penjajahan hingga sekarang menyebabkan terjadinya masalah dan perpecahan antara pemilik tanah dan penggarap.Pemerintahjuga melakukan perlakuan yang berbeda, dengan selalu mengutamakan etnis Arab sehingga menciptakan kecemburuan sosial dan ketidak puasanya terhadap pemerintah.

Lebih jauh,perkembangan konflik yang terjadi di Darfur mengarah kepada gerakan separatisme .Kemunculan dari kelompok sudan *Liberations Army (SLA*) dan *Justice Equality Movement* (JEM) adalah suatu bentuk pemberontakan dari ketidakpuasan suatu kelompok terhadap pemerintah yang sudah di anggap tidak adil.

Mengenai gerakan separatisme,Dewi Fortuna Anwar berpendapat, bahwa separatisme berkaitan erat dengan pembentukan negara .Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang rasa benci Kepada pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan.[[15]](#footnote-15)

Konflik antara pemerintah dan pemberontak yang terjadi di Darfur.Sudan berlangsaung dengan menggunakan persenjataansehingga menimbulkan kerugian tidak hanya kerusakan , namun jutaan nyawa tidak berdosa yang harus melayang sia-sia.Selebihnya pengertian mengenai konflik bersenjata, adalah [[16]](#footnote-16)

Konflik bersenjata merupakan kategori yang lebih sempit ,menunjukan konflik dimana konflik-konflik pada kedua sisi sama-sama mengunakan kekuatan .Sulit menetukan konflik ini karena konflik jenis ini dapat meliputi situasi berkelanjutan seperti pertempuran militer atau penyerangan terhadap penduduk sipil oleh tentara sampai dengan perang total dengan jumlah korban yang sangat benar.

Adanya *peace of agreemen* diantara pihak yang berkonflik, dalam hal ini SLA dengan pasukan pemerintah Sudan dalam Darfur *Peace Agreement* berimplikasi perlunya dilakukan tindakan nyata dilapangan agar tercapai perdamaian yang di inginkan.Oleh karena itu *peace of afreement* .Dalam konteks inilah PB melaksanakan operasi misi pemeliharaan perdamaian yang di laksanakan oleh UNDPKO,salah satunya yaitu dengan pengerahan UN Police dan FPU Indonesia termasuk komponen di dalamnya yang diharapkan dapat berperan secara maksimal.

**Hipotesis**

“Dengan keterlibatan Indonesia sebagai misi perdamaian PBB dalam pelaksanaan operasi melalui peace maka konflik internal di Darfur Sudan dapat di rendam

**Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Untuk lebih memperjelas dan sebagai pembuktian atas hipotesis yang penulis paparkan dia atas maka operasionalisasi variabel dituangkan ke dalam tabel di bawah ini:

Dengan keterlibatan Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam konflik Darfur Sudan secara aktif seperti pengawasan pada area of responsibility dan mengimplementasikan mandate PBB maka konflik Darfur Sudan dapat di redam.

Tabel I

Operasional Variabel dan Indikator

| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analissis) |
| --- | --- | --- |
| Karena FPU Indonesia aktif dalam menjalankan dan mengupayakan misi pemeliharaan perdamaian PBB di Darfur ,Sudan | Turut sertanya FPU Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB Di darfur ,Sudan | Pengiriman FPU Indonesia IV pada misi UNAMID pada tanggal 17 October 2010.(Sumber Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Satgas FPU Indonesia IV |
|  | Mendukung secara aktif dan menjalankan mandat yang diamanatkan oleh PBB | Implementasi tugas pengawasan pada Area of Responsability (AOR) dari FPU Indonesia ,yaitu wilayah yang menjadi tanggung jawaban suatu kontingent dalampelaksanaan tugas pada operasi PBB.Menjalankan mandat-mandat lain seperti Escort perlindungan warga sipil dan Confidence Building Patrol (sumber :buku Laporan Pelaksanaan Tugas Satgas FPU Indonesia IV)  |
| Variabel Terikat:Maka konflik yang terjadi di daerah misi dapat direndam ,mandat yang diamanatkan oleh PBB dapat terlaksana dengan baik dan memberikan apresiasi positif dari dunia International kepada FPU Indonesia | Komparasi situasi di daerah misi sebelum dan pada saat dilaksanakannya UNAMID | Darfur yang merupakan daerah yang mengalami konflik berkepanjangan akhirnya dapat membawa kedua belah pihak yang bertikai ,yaitu sudan Liberation Army dan Pemerintah kembali berunding untuk duduk bersama membicarakan perdamaian di Perundingan Doha pada tanggal 5 februari 2011.(Sumber Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Satgas FPU Indonesia IV) |
|  | Keberhasilan dalam menjalankan mandat-mandat dari PBB,serta melihat dari dinamika dan kendala-kendala yang terjadi saat pelaksanaan misi UNAMID yang dapat diselesaikan dengan baik | FPU Indonesia mendapat kepercayaan untuk melakukan pengawalan terhadap delegasi dari UN maupun delegasi dari berbagai negara untuk melaksanakan pengawalan dalam wilayah elFasher maupun wilayah kamp pengungsian.FPU Indonesiadapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat.segala kendala dapat di carikan langkah-langkah penyelesaiannya (sumber Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Satgas Indonesia IV  |
|  | Berbagai apresiasi positif dan kepercayaan yang diberikan kepada FPU Indonesia | Apresiasi positif yang di berikan oleh Komandan Militer UNAMID,Letjen Patrick Nyamvumba,kepada FPU Indonesia .(Sumber :http://indonesiaproud.wordpress.com/20011/10/17kontingen polisi indonesia –raihpredikat-fpu-terbaik-di-darfur-sudan/) |

**1.7.2 Skema Kerangka Teoritis**

Alur pemikiran mengenai peranan FPU Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian PBB di Darfur,Sudan.

*United Nations*

UNDPKO

Pemerintah Republik Indonesia

Kepolisian Negara

Republik Indonesia

Satuan Tugas FPU Indonesia

UNAMID

Pelaksanaan *Daftar Peace Agrement*

Perlindungan warga sipil dan *confidence Building Patrol*

Patroli dan Pengawasan *Area of Responsiblilty*

Peranan aktif FPU Indonesia

Konflik dapat diredam

Apresiasi positif kepada FPU Indonesia

**1.8 Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

**1.8.1 Metode Penelitian**

Metode Penelitian *Deskriptif Analisis*.Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.Kemudian penulis akan menganalisis suatu fenomena berdasarkan data yang terkumpul.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lebih kompherensif,serta menjelaskan kembali dan menganalisis mengenai peranan FPU Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian PBB di Darfur,Sudan.

Metode Penelitian *Historis*.Metode yang digunakan untuk menelaah peristiwa masa lalu.Penelitian ini akan menelaan mengenai sejarah dan latar belakang konflik yang terjadi di Darfur,Sudan.Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengkomparasikan situasi di daerah misi sebelum dan pada saat misi UNAMID ini dilakukan.

**1.8.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan teknik studi pustaka yaitu penelusuran data berdasarkan buku, artikel, jurnal, serta sumber data lainnya yang berkaitan dengan Satgas FPU Indonesia yang menjalankan misi perdamaian PBB di Darfur,Sudan.juga,sumber data mengenai konflik yang terjadi di Sudan dan di Darfur pada khususnya

**1.9 Lokasi dan Waktu Penelitian**

**1.9.1 Lokasi Penelitian**

Instansi

Kapolrestabes Bandung

Jl.Jawa no1

Bandung

Divisi Hubungan International Mabel Polri

Jl.Truno Joyo No 3 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan

Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung,Jl.Lengkong Besar No 17, Bandung

Sumber lain

Media Massa

Media Cetak

Internet

Kamus Hubungan International

**1.9.2 Waktu Penelitian**

Adapun rincian serta tahapan dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2

Waktu Magang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Kegiatan | TAHUN 2015-2016 |
| Mei | Juni | July | Agustus | September | October | November | December |
| 1 | Persiapan judul dan Acc Judul | 28 Mei 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Persiapan Studi Kepustakaan |  | 13 Juni 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bimbingan UP, Koreksi, Revisi dan ACC untuk diseminarkan |  |  | 12 July 2016 |  | 7 September 2016 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.10 Sistematika**

Bab I Adalah pendahuluan yang mendeskripsikan tentang latar Belakang Penelitian , Alasan peneliti mengangkat topic ini, konflik internal dan external di Darfun Sudan, korban dan kerugian dan intervensi dan PBB dalam bentuk bantuan kemanusiaan atau humanitarian Indentifikasi masalah, Tujuan dan keguanaan Penelitian,Kerangka Teoridan Hipotesis,Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan waktu Penelitian,Serta Sistematika Penulisan.

BAB II Adalah tinjauan umum Pasukan PBB sebagai misi perdamaian Indonesia.

Bab III Adalah tinjauan umum Pasukan PBB sebagai misi perdamaian Indonesia di Darfur, Sudan.Dalam bab ini peneliti akan terlebih dahulu membahas mengenai sejarah konflik sudan dan latar belakang konflik yang terjadi di Darfur.Kemudian penulis akan membahas mengenai misi perdamaian yang dilakukan oleh PBB di Darfur,Sudan.

Bab IV Adalah mengenai partisipasi Indonesia melalui misi PBB dalam menyelesaikan resolusi konflik di Darfur Sudan.

Bab V Adalah penutup yang akan memaparkan kesimpulan dari penelitian yang di lakukan oleh penulis mengenai .Indonesia melalui misi PBB dalam menyelesaikan resolusi konflik di Darfur Sudan.

1. Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humanit*er, Jakarta, International Committee of the Red Cross. 1999, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid [↑](#footnote-ref-2)
3. Peacekeeping Operation, Fierda Milasari Rahmawati, FISIP UI, 2010 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kamus Hubungan Internasional, Khasan Ashari hal 359. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kamus Hubungan Internasional, Khasan Ashari hal 344. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kamus Hubungan Internasional, Khasan Ashari hal 342. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kamus Hubungan Internasional, Khasan Ashari hal 341-345. [↑](#footnote-ref-7)
8. James N. Rosenau dkk, *World Politics An Introduction* (new York : The Free Press, 1976), hlm. 16-17. [↑](#footnote-ref-8)
9. Webster Merriam, *Webster’s New World Mini Dictionary*, Michel Agnes (ed.) 1st edition (India : IDG Books, 2000), hlm, 400. [↑](#footnote-ref-9)
10. James N. Rosenau dkk., Op. City, hlm.16 [↑](#footnote-ref-10)
11. Kamus Hubungan Internasional [↑](#footnote-ref-11)
12. Yulius P. Hermawan, Op. City hlm. 15. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid,* hlm. 78. [↑](#footnote-ref-13)
14. Michael E. Brown Guibernau dan John Rex (eds), 1997, *Causes and Implications of Ethnic Conflict dalam The Ethnicity Reader, Nationalism, Multiculturalism and Migration,* Great Britain: Polity Press, hlm. 80-100 [↑](#footnote-ref-14)
15. Dewi Fortuna Anwar dkk. Op.Cit. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hugh Miall dkk., Op.Cit. Hlm 30. [↑](#footnote-ref-16)